

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN PENYAKIT HIV-AIDS PADA TAHUN 2023

Mahazza Ravialdi Lubuk, Lusia Astrika

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Strategi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi transmisi virus sekaligus memberikan perlindungan dan pendampingan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) melalui integrasi aspek medis, psikososial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang guna mendukung intervensi yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi unsur pemerintah, pengelola panti atau lembaga pendampingan HIV/AIDS, dan ODHA. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dari aspek sumber daya melalui ketersediaan fasilitas kesehatan dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat maupun ODHA. Pemerintah juga telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga atau yayasan dalam pendampingan ODHA sehingga penanganan di lapangan lebih terkoordinasi. Namun, aspek komunikasi masih belum optimal karena pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS, pentingnya pemeriksaan dini, serta akses layanan kesehatan belum tersebar secara merata. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian kasus HIV/AIDS di Kota Semarang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan guna menekan penularan HIV/AIDS.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan HIV/AIDS 2023, Kota Semarang

ABSTRACT

The HIV/AIDS strategy in Semarang reflects the commitment of the local government in reducing the transmission of the virus while providing protection and assistance for people with HIV/AIDS (PLWHA) through the integration of medical, psychosocial, and institutional aspects. This study aims to identify and evaluate the implementation of HIV/AIDS prevention policies in Semarang to support sustainable interventions. The study used qualitative methods with descriptive analytical approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of purposively selected informants, including government elements, managers of HIV/AIDS nursing homes or assistance institutions, and PLWHA. Analysis of policy implementation refers to the model of George C. Edwards III covering communications, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

The results showed that the implementation of HIV/AIDS policy in Semarang has been running quite well, especially in terms of resources through the availability of health facilities and ease of access to services for the community and PLWHA. The government has also collaborated with various institutions or foundations in assisting PLWHA so that handling in the field is more coordinated. However, the communication aspect is still not optimal because public knowledge about HIV / AIDS, the importance of early screening, and access to health services has not been spread evenly. These conditions have an impact on low awareness of some people and become one of the challenges in controlling HIV/AIDS cases in Semarang. Therefore, a stronger synergy between the government and related institutions is needed to improve education and understanding of the community in a sustainable manner in order to suppress the transmission of HIV/AIDS.

Keywords: Policy implementation, HIV/AIDS 2023, Semarang City

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi perhatian global, nasional, maupun daerah. Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam melawan berbagai infeksi. Apabila infeksi HIV tidak terdeteksi dan tidak memperoleh penanganan yang tepat, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), yaitu tahap lanjutan infeksi yang menyebabkan meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit oportunistik. Sejak pertama kali ditemukan pada awal tahun 1980-an, HIV/AIDS telah berkembang menjadi persoalan kesehatan publik yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, psikologis, serta kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

Di tingkat nasional, HIV/AIDS masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Penyebaran HIV tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu, tetapi telah berkembang menjadi persoalan masyarakat yang lebih luas akibat berbagai faktor sosial dan struktural. Tingginya mobilitas penduduk, perubahan pola interaksi sosial, rendahnya tingkat pengetahuan mengenai mekanisme penularan, serta masih kuatnya stigma terhadap

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi beberapa faktor yang memengaruhi keberlanjutan permasalahan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan karena dapat menyebabkan masyarakat enggan melakukan pemeriksaan dini maupun mengakses layanan kesehatan.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki karakteristik perkotaan yang kompleks dengan tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Kota Semarang menghadapi tantangan dalam pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah kumulatif kasus HIV mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV di Kota Semarang mencapai 7.006 kasus, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan strategi penanganan yang berkelanjutan.

Peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor perilaku berisiko seperti hubungan seksual tanpa perlindungan serta penggunaan jarum suntik secara bersama pada kelompok pengguna narkoba suntik menjadi salah satu jalur utama transmisi HIV. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan deteksi dini HIV/AIDS turut memperbesar tantangan pengendalian penyakit ini. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya stigma sosial terhadap ODHA yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami

hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan maupun menjalani pengobatan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya penanggulangan HIV/AIDS. Salah satu landasan kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program, seperti promosi kesehatan, pencegahan penularan, penyediaan layanan pengobatan antiretroviral (ARV), serta pendampingan sosial bagi ODHA. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis implementasi kebijakan, termasuk pembentukan kelompok kerja lintas sektor, layanan kesehatan berkesinambungan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga.

Secara konseptual, kebijakan penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk mengurangi angka penularan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan, serta memberikan perlindungan kepada ODHA. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh para pelaksana di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi aspek penting karena terdapat kemungkinan munculnya perbedaan antara tujuan

yang telah dirumuskan dalam kebijakan dengan kondisi nyata ketika kebijakan diterapkan.

Meskipun berbagai program penanggulangan HIV/AIDS telah dilaksanakan, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain masih tingginya stigma masyarakat terhadap ODHA, keterbatasan sumber daya manusia, kendala koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya penyebaran informasi mengenai pencegahan dan layanan HIV/AIDS. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan berbagai aktor terkait dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang diterapkan, termasuk faktor pendukung maupun hambatan yang muncul selama proses implementasi.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan HIV/AIDS juga perlu mempertimbangkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, Dinas

Kesehatan sebagai institusi teknis dalam pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat atau lembaga pendamping berperan dalam pemberdayaan serta pendampingan ODHA, sedangkan masyarakat menjadi kelompok yang menerima dampak langsung dari kebijakan tersebut. Kolaborasi antaraktor menjadi faktor penting karena penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan kelembagaan.

Penelitian terdahulu mengenai HIV/AIDS di Kota Semarang sebagian besar telah membahas evaluasi kebijakan, kolaborasi antaraktor, maupun strategi penanganan kelompok berisiko. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji hubungan antara regulasi kebijakan daerah dengan implementasi teknisnya secara terintegrasi. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan serta belum banyak melibatkan perspektif penerima manfaat kebijakan, yaitu ODHA.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2023 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan penanggulangan HIV/AIDS,

mengidentifikasi berbagai kendala implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2023. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan, peran aktor yang terlibat, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang.

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara sistematis berdasarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis karena menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian

didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus HIV/AIDS yang tinggi di Jawa Tengah serta memiliki berbagai kebijakan dan program khusus dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah kumulatif kasus HIV di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dan mencapai 7.006 kasus pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang membutuhkan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Informan penelitian terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu unsur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, lembaga atau organisasi pendamping HIV/AIDS sebagai mitra pelaksanaan program, serta Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai kelompok penerima manfaat kebijakan. Keterlibatan berbagai kelompok informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang

lebih luas mengenai implementasi kebijakan HIV/AIDS di Kota Semarang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan, koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta berbagai kendala yang ditemukan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan daerah, peraturan wali kota, laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, data epidemiologi HIV/AIDS, dokumen program, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil penelitian lapangan serta memberikan gambaran mengenai kebijakan dan perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang. Kebijakan utama yang menjadi objek penelitian adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana teknis kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan terkait implementasi kebijakan HIV/AIDS. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS serta melihat berbagai aktivitas pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak terkait. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa regulasi, laporan, arsip, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data yang berbeda. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi yang diperoleh serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi juga digunakan untuk melihat perbedaan maupun kesamaan perspektif antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, lembaga pendamping sebagai mitra program, dan ODHA sebagai penerima manfaat kebijakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (data

condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang memudahkan peneliti memahami pola hubungan dan fenomena yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesimpulan penelitian sesuai dengan temuan empiris.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis utama. Teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam penelitian ini, empat indikator Edwards III digunakan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan HIV/AIDS, yaitu komunikasi untuk melihat penyampaian informasi kebijakan, sumber daya untuk melihat dukungan fasilitas dan kemampuan pelaksana, disposisi untuk melihat sikap serta komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi untuk melihat mekanisme organisasi dalam menjalankan kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik purposive sampling, serta kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam

penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, identifikasi hambatan implementasi, serta rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulan HIV/AIDS Tahun 2023

Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran HIV serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS sebagai dasar hukum utama, serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2016 sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program, mulai dari pencegahan, edukasi masyarakat, pemeriksaan dini, layanan pengobatan ARV, hingga pendampingan terhadap ODHA.

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, termasuk faktor pendukung maupun hambatan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

A. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara jelas kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, komunikasi mencakup proses penyampaian informasi mengenai program pemerintah, edukasi pencegahan HIV/AIDS, mekanisme layanan kesehatan, serta koordinasi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan ganjil-genap, tujuan utama yang ingin dicapai adalah mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan raya, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota

Semarang telah melakukan berbagai bentuk komunikasi kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kesehatan, layanan konseling, serta kerja sama dengan berbagai lembaga pendamping HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai pencegahan, pemeriksaan HIV, serta akses layanan pengobatan kepada masyarakat dan kelompok rentan.

Dari perspektif masyarakat, sebagian besar pengguna jalan juga mengakui bahwa kebijakan ganjil-genap memberikan dampak positif terhadap kelancaran perjalanan. Waktu tempuh pada beberapa ruas jalan utama menjadi lebih singkat dibandingkan ketika tidak terdapat pembatasan kendaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan mampu mencapai tujuan jangka pendek berupa pengurangan kepadatan lalu lintas.

Meskipun Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih menghadapi beberapa kendala. Penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme penularan HIV, pentingnya pemeriksaan dini, serta keberadaan layanan kesehatan yang tersedia.

Selain itu, stigma sosial terhadap ODHA menunjukkan bahwa komunikasi publik

mengenai HIV/AIDS masih perlu diperkuat. Informasi yang kurang tepat dapat menyebabkan munculnya diskriminasi sehingga masyarakat dengan risiko HIV cenderung enggan melakukan pemeriksaan atau mengakses layanan kesehatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang telah berjalan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih luas, berkelanjutan, dan mampu mengurangi stigma masyarakat terhadap HIV/AIDS.

B. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan aktor pelaksana dalam menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam implementasi kebijakan HIV/AIDS, sumber daya mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga pelaksana, pendanaan, obat-obatan, serta dukungan lembaga yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber daya menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung proses pemeriksaan, konseling, serta pengobatan bagi masyarakat dan ODHA. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan lembaga

masyarakat dan yayasan pendamping untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Ketersediaan layanan seperti Voluntary Counseling and Testing (VCT) serta terapi antiretroviral (ARV) menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk menekan perkembangan HIV/AIDS. Program tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap deteksi dini dan pengobatan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek sumber daya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesinambungan pendampingan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana dalam menghadapi kompleksitas permasalahan HIV/AIDS. Sumber daya dalam implementasi kebijakan HIV/AIDS di Kota Semarang telah mendukung pelaksanaan program, tetapi masih membutuhkan penguatan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

C. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap tujuan kebijakan yang dijalankan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak

hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesediaan dan komitmen aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Komitmen tersebut terlihat melalui pelaksanaan berbagai program kesehatan, penyediaan layanan bagi ODHA, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak dalam pendampingan HIV/AIDS.

Selain pemerintah, lembaga pendamping seperti yayasan dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan sosial kepada ODHA. Keberadaan lembaga tersebut membantu pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau melalui pendekatan birokrasi formal.

Tantangan dalam aspek disposisi masih muncul akibat kompleksitas persoalan HIV/AIDS yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga aspek sosial. Sikap masyarakat yang masih memberikan stigma terhadap ODHA menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendamping, tenaga kesehatan, maupun masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif.

D. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan HIV/AIDS

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, koordinasi, serta prosedur yang digunakan dalam menjalankan kebijakan. Dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, struktur birokrasi menentukan bagaimana koordinasi antar instansi dapat berjalan untuk mencapai tujuan kebijakan. Masyarakat tidak selalu sama.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan HIV/AIDS di Kota Semarang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, hingga lembaga pendamping ODHA. Kolaborasi antaraktor tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS.

Selain itu, adanya kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi untuk membeli kendaraan tambahan menunjukkan adanya ketimpangan dalam dampak kebijakan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung lebih mudah beradaptasi dibandingkan masyarakat yang hanya memiliki satu kendaraan.

Pemerintah Kota Semarang telah membangun mekanisme koordinasi melalui berbagai bentuk kerja sama lintas sektor. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan, termasuk pembentukan kelompok kerja lintas sektor dan pengaturan layanan kesehatan berkesinambungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam penyelarasan program, pembagian peran, serta integrasi data terkait HIV/AIDS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal.

E. Analisis Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang telah berjalan melalui berbagai program dan layanan. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Stigma sosial terhadap ODHA masih menjadi tantangan utama karena menyebabkan sebagian masyarakat enggan melakukan pemeriksaan maupun mengakses layanan kesehatan. Kedua, keterbatasan

komunikasi publik menyebabkan informasi mengenai HIV/AIDS belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ketiga, koordinasi antaraktor masih perlu diperkuat agar program yang dilakukan dapat berjalan lebih terintegrasi.

Permasalahan HIV/AIDS menunjukkan bahwa penanganannya tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial, edukasi masyarakat, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan HIV/AIDS pada Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang telah berjalan melalui berbagai program dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak terkait. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan layanan kesehatan, program pencegahan, edukasi masyarakat, pemeriksaan HIV, layanan terapi antiretroviral (ARV), serta pendampingan terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan diperkuat

melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2016 sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan jumlah kasus HIV secara kumulatif menunjukkan bahwa permasalahan HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah kumulatif kasus HIV meningkat hingga mencapai 7.006 kasus pada tahun 2023, sehingga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS masih membutuhkan penguatan strategi dan koordinasi antar aktor.

Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai bentuk penyampaian informasi melalui edukasi, sosialisasi, konseling, serta kerja sama dengan lembaga pendamping. Namun, penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS belum sepenuhnya merata karena masih terdapat masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas mengenai pencegahan, pemeriksaan dini, dan akses layanan kesehatan. Selain itu, stigma sosial terhadap ODHA masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan karena dapat memengaruhi keberanian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan memperoleh pengobatan.

Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan HIV/AIDS di Kota Semarang telah didukung oleh ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, layanan pemeriksaan HIV, terapi ARV, serta keterlibatan organisasi masyarakat dalam pendampingan ODHA. Keberadaan layanan tersebut menunjukkan adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa keterbatasan seperti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pendampingan, serta keberlanjutan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Dari aspek disposisi, penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki komitmen dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah, tenaga kesehatan, serta lembaga pendamping menunjukkan peran aktif dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada ODHA. Namun, keberhasilan kebijakan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, terutama masih adanya stigma dan diskriminasi yang menyebabkan sebagian ODHA mengalami hambatan dalam memperoleh dukungan sosial maupun layanan kesehatan.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi,

implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang telah melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan lembaga pendamping ODHA. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan karena permasalahan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kelembagaan. Namun, koordinasi antar aktor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan HIV/AIDS tahun 2023 telah berjalan dan memberikan kontribusi dalam penyediaan layanan serta pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan terutama pada aspek komunikasi publik, stigma sosial, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan jangkauan layanan. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS perlu didukung melalui penguatan edukasi masyarakat, peningkatan kolaborasi antar aktor, perluasan akses layanan kesehatan, serta pendekatan sosial yang mampu mengurangi stigma terhadap ODHA.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS pada Tahun 2023, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang..

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS untuk memastikan bahwa program yang telah dijalankan mampu menjawab perkembangan permasalahan HIV/AIDS di masyarakat. Evaluasi tersebut penting dilakukan terutama terhadap aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas program pencegahan dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik mengenai HIV/AIDS melalui edukasi yang lebih luas, berkelanjutan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penularan HIV, pentingnya pemeriksaan dini, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, lembaga

pendamping, serta kelompok masyarakat yang terdampak. Kolaborasi yang lebih kuat diperlukan karena penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan kelembagaan.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai pelaksana teknis kebijakan perlu terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan HIV/AIDS, terutama dalam aspek pemeriksaan dini, konseling, pengobatan ARV, serta pendampingan ODHA. Perluasan akses layanan menjadi penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Dinas Kesehatan perlu memperkuat sistem pendataan dan koordinasi informasi mengenai HIV/AIDS agar kebijakan yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketersediaan data yang akurat mengenai persebaran kasus, kelompok usia, kelompok risiko, serta kebutuhan pelayanan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi intervensi yang lebih tepat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga perlu meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana melalui pelatihan dan penguatan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai HIV/AIDS sehingga mampu membedakan antara fakta medis mengenai penularan HIV dengan berbagai anggapan yang tidak tepat. Peningkatan literasi kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, masyarakat perlu berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, karena dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat membantu ODHA menjalani pengobatan secara konsisten serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat juga diharapkan lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, termasuk melakukan pemeriksaan HIV secara dini bagi kelompok yang memiliki risiko, karena deteksi awal dapat mendukung keberhasilan pengobatan dan pencegahan penyebaran HIV.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis implementasi kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas, seperti menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji berbagai aspek lain dalam penanggulangan HIV/AIDS, seperti efektivitas program pencegahan pada kelompok rentan, kualitas layanan kesehatan HIV, keberhasilan terapi ARV, pengaruh stigma sosial terhadap akses layanan, maupun perbandingan implementasi kebijakan HIV/AIDS antarwilayah. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai strategi penanggulangan HIV/AIDS serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2023). *Laporan Tahunan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Semarang Tahun 2023*. Semarang: Dinkes Kota Semarang.
- Wibowo, Agus. (2016). *Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana dan Isu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo..
- Caresa Ajeng Kumaladewi. 2019. “PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)/ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DI KOTA SEMARANG.” *Sustainability* (Switzerland) 11(1):1–14.
- Harmayanti, Oktavia. 2019. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Hiv/Aids Dengan Perilaku Seksual Pada Pengguna Napza Suntuk (Penasun) Di Indonesia (Analisis Data Stbp 2015).” *Jurnal Kesehatan*.
- Hasibuan, Alsanawi, Muhamad Farhan Zaqie Maulana, and Sitriatul Mauliah. 2024. “Melonjaknya Kasus HIV Dikalangan Remaja Indonesia.” *Amsir Community Service Journal* 2(1):1–8. doi:10.62861/acsj.v2i1.392.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- PALUPI, SILVIA RIMA. 2021. “ANALISA KINERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA MAGELANG DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA MAGELANG.” 1–23..
- Prameshwar, Fadilla Rizky. 2025. “HUBUNGAN TEORI HEALTH BELIEF MODEL DENGAN KEPATUHAN TERAPI ANTIRETROVIRAL DI PUSKESMAS X JAKARTA SELATAN.” 21(2). doi:10.19184/ikesma.v21i2.46599.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Semarang.

Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2019).
Laporan Epidemiologi HIV/AIDS
di Kota Semarang Tahun 2019.
Semarang: Dinas Kesehatan Kota
Semarang..

Hidayati, W., & Nurhayati, S. (2017). Efektivitas
program pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS.

Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2023).
Laporan Tahunan Program
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS Kota Semarang Tahun
2023. Semarang: Dinas Kesehatan
Kota Semarang.

Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI) Kota Semarang.
(2023). Laporan Pendampingan
Komunitas Berisiko HIV/AIDS
Kota Semarang Tahun 2023.
Semarang: PKBI Kota Semarang.

Abadi, Kismartini, & Sundarso. (2018).
Evaluasi Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penanggulangan
HIV/AIDS di Kota Semarang.
Jurnal Kebijakan Publik dan
Administrasi.

Turi, J. S., & Fitriana, K. N. (2023).
Collaborative governance dalam
penanggulangan HIV dan AIDS di
Kota Semarang. *Journal of Public
Policy and Administration
Research*, 1(1).

Puspitasari, P. (2020). Strategi
penanggulangan HIV/AIDS pada
kelompok berisiko tinggi di